



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI XI DPR RI**

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA (BI), OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), DAN BUMN (PMN DAN PRIVATISASI), DAN BADAN PENGELOLA INVESTASI (BPI) DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DAN PENGELOLAAN *HOLDING* INVESTASI

Rapat Ke : 11
Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / ke-4 dan Rapat Dengar Pendapat / ke-3
Dengan : 1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP);
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); dan
3. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari, Tanggal : Selasa, 2 September 2025
Waktu : Pukul 12.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I
Ketua Rapat : **Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.**
(Ketua Komisi XI DPR RI)

Sekretaris Rapat : Danis Maya
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)

Acara : Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKP, LKPP, dan BPK pada APBN TA 2026.

Hadir : 1. ... orang dari **48 Anggota** Komisi XI DPR RI; dan
2. **MUHAMMAD YUSUF ATEH** (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) beserta jajarannya;
3. **HENDRAR PRIHADI** (Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) beserta jajarannya; dan
4. **BAHTIAR ARIF** (Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kepala BPKP dan Kepala LKPP serta Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Pelaksana Tugas Sekjen BPK RI dilakukan dengan kehadiran secara fisik. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 279** dan **Pasal 281** Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul **13.15 WIB** dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kepala BPKP dan Kepala LKPP serta Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Pelaksana Tugas Sekjen BPK RI diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kepala BPKP dan Kepala LKPP serta Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Pelaksana Tugas Sekjen BPK RI, kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Komisi XI DPR RI bersama, Kepala BPKP, Kepala LKPP, dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal BPK RI menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Kepala BPKP, Kepala LKPP, dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal BPK RI tentang Rencana Kerja dan Anggaran BPKP, LKPP, dan BPK RI pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2026 (APBN TA 2026).
2. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu Anggaran BPKP dalam APBN TA 2026 sebesar **Rp2.374.938.553.000,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)**, dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)
1	Pengawasan Pembangunan	395.535.656.000
2	Dukungan Manajemen	1.979.402.897.000
Total		2.374.938.553.000

Berdasarkan fungsi Pagu Anggaran BPKP TA 2026, sebagai berikut:

FUNGSI	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)
089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2.374.938.553.000
01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM	
Program Pengawasan Pembangunan	395.535.656.000
Program Dukungan Manajemen	1.979.402.897.000

3. Komisi XI DPR RI mendukung dan menyetujui usulan BPKP mengajukan tambahan anggaran sebesar **Rp758.132.801.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Alokasi Tambahan Anggaran 2026
a. Program Pengawasan Pembangunan	382.560.873.000
b. Program Dukungan Manajemen	375.571.928.000

untuk diusulkan dalam APBN Tahun 2026.

4. BPKP menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan belanja pada Tahun 2026 diarahkan untuk:
- Peningkatan kualitas pengawasan program-program prioritas pembangunan Pemerintah;
 - Menjamin kualitas belanja Pemerintah untuk menciptakan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi APBN, serta APBD.
5. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu Anggaran LKPP dalam APBN TA 2026 sebesar **Rp216.266.954.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)**, dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)
1	Pengadaan Barang/Jasa Nasional	108.167.360.000
2	Dukungan Manajemen	108.099.594.000
Total		216.266.954.000

Berdasarkan fungsi Pagu Anggaran LKPP TA 2026, sebagai berikut:

FUNGSI	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)
106. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	216.266.954.000
01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM	
Pengadaan Barang /Jasa Nasional	108.167.360.000
Program Dukungan Manajemen	108.099.594.000

6. Komisi XI DPR RI mendukung dan menyetujui usulan LKPP mengajukan tambahan anggaran sebesar **Rp60.562.010.000,00 (Enam Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Sepuluh Ribu Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Alokasi Tambahan Anggaran 2026
a. Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	40.000.000.000

b. Program Dukungan Manajemen	20.562.010.000
-------------------------------	----------------

untuk diusulkan dalam APBN Tahun 2026.

7. LKPP menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan belanja pada Tahun 2026 diarahkan untuk:
- Peningkatan kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung program Prioritas Nasional Asta Cita;
 - Peningkatan kualitas penerapan tata kelola pengadaan dan tata kelola internal;
 - Peningkatan penggunaan barang-barang produk dalam negeri, TKDN dan industri UMKM; dan
 - Penggunaan sistem e-katalog yang ramah pengguna, kompetitif dan transparan.
8. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu Anggaran BPK RI dalam APBN TA 2026 sebesar **Rp6.834.960.000.000,00 (Enam Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)**, dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)
1	Pemeriksaan Keuangan Negara	5.425.003.513.000
2	Dukungan Manajemen	1.409.956.487.000
Total		6.834.960.000.000

Berdasarkan fungsi Pagu Anggaran BPK RI TA 2026, sebagai berikut:

FUNGSI	PAGU ANGGARAN TAHUN 2026 (dalam rupiah)
004 – Badan Pemeriksa Keuangan	6.834.960.000.000
01 – FUNGSI PELAYANAN UMUM	
Program Pemeriksaan Keuangan Negara	5.425.003.513.000
Program Dukungan Manajemen	1.409.956.487.000

9. BPK RI menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan belanja pada Tahun 2026 diarahkan untuk:
- Meningkatkan pemeriksaan dan pengelolaan tanggungjawab keuangan negara serta memperkuat pemeriksaan kinerja, dan tetap mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - Meningkatkan kapasitas organisasi dan pelayanan publik.
10. Kepala BPKP, Kepala LKPP, dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal BPK RI menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan/tanggapan dari Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lambat 7(tujuh) hari kerja.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kepala BPKP dan Kepala LKPP serta Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Pelaksana Tugas Sekjen BPK RI ditutup pada pukul **15.01 WIB**.

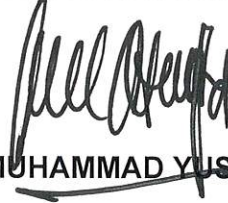
Jakarta, 2 September 2025

**PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
KETUA RAPAT,**



Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.

**KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,**



MUHAMMAD YUSUF ATEH

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



HENDRAR PRIHADI

**PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN,**



BAHTIAR ARIF